

# PERENCANAAN MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETANI BERLAHAN SEMPIT

Budiman Notoatmojo<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*In general, the goal of the study is to develop planning model for alleviation for the poor from small farmers land-holding. Specifically the main objective is to delineate the poorness of small land holding and how to recommend the alternative direct agro business investment planning model which will be given to them. The analytical methodology used statistical model entropy and coefficient of variation with the main parameter of farmers income and its stability. The sampling taken from 6 kabupaten in 3 provinces, Central and East Jawa and West Sumatra. Mostly the model used is integrated farming system (livestock, food crops, and perennial crops).*

**Keywords:** *poverty alleviation, farmer*

## ABSTRAK

*Secara umum, tujuan penelitian ini membuat model perencanaan pengentasan kemiskinan untuk petani berlahan sempit. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan petani berlahan sempit dan memberikan rekomendasi alternatif perencanaan agribisnis langsung yang akan diberikan kepada mereka. Metode analitis yang digunakan adalah model entropy statistik dan variasi koefisien dengan parameter utama pendapatan petani dan stabilitasnya. Sampelnya diambil dari 6 kabupaten di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Model tersebut kebanyakan menggunakan sistem pertanian terintegrasi (ternak, pangan, dan tumbuhan abadi).*

**Kata kunci:** *Penanggulangan kemiskinan, petani*

---

<sup>1</sup> **Peneliti Senior Deptan RI & Staf Pengajar Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta**

## PENDAHULUAN

Sebelum adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak lebih dari 4 tahun silam, Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk masyarakat pedesaan dan masyarakat pertanian. Keberhasilan tersebut diakui bahwa bukan hanya dalam hal peningkatan pendapatan tetapi juga dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin (Pakpahan *et al*, 1995). Selama periode antara 1970-an dan 1980-an, Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 65 persen menjadi 17 persen. Prestasi itu merupakan hasil upaya yang dilakukan sejak lama.

Akan tetapi, dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, angka penduduk miskin tersebut kembali meningkat dengan cepat. Pada akhir tahun 1998, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa yang 31,9 juta diantaranya terdapat di pedesaan. Beberapa lembaga, antara lain *World Food Program* (WFP) mengakui adanya dampak sosial krisis tersebut walaupun dinilai tidak sedramatis seperti yang digambarkan. Bank Dunia memperkirakan bahwa pertambahan jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat krisis ekonomi mencapai 11 persen atau sekitar 22 juta orang pada Februari 1998. Akan tetapi, ada anggapan bahwa sejak tahun 2000 jumlah penduduk miskin tersebut kembali menunjukkan penurunan.

Tingginya jumlah penduduk miskin tersebut menuntut dilakukannya langkah kongkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Oleh karena itu, menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu prioritas dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Dengan perkataan lain, bahwa diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani miskin di pedesaan, berupa pengaplikasian program pembangunan. Bila tidak, hal itu akan membuka peluang munculnya permasalahan yang dapat mengancam proses keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, baik berupa program jangka panjang maupun program jangka pendek. Program jangka panjang lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program jangka pendek yang secara massal dilaksanakan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan minimum pada standar hidup pokok. Manfred dan Shauma (1998) menemukan bahwa berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang efektif baik pada anggota masyarakat yang menjadi sasaran program maupun pada pelaksana program itu sendiri. Sebagian besar program tidak mengikutsertakan secara aktif masyarakat. Dengan demikian, banyak dijumpai kasus bahwa program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran baik jenis kegiatan maupun kelompok targetnya.

Petani miskin di pedesaan dapat diidentikkan dengan petani berlahan sempit yang disertai oleh keterbatasan aksesibilitas terhadap peluang ekonomi sebagai sumber pendapatan di luar pertanian. Suntoro (1989) beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Faktor eksternal adalah faktor di luar jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk meraih kesempatan. Artinya, bukan karena seseorang tidak mau bekerja tetapi struktur yang ada yang menjadi hambatan. Sementara itu, berbagai studi memberi gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (Rachman 1989 dan Emanuel 2000), rendahnya penguasaan aset produktif, seperti lahan pertanian dan rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber permodalan dan peluang ekonomi (Taryoto, 1995).

Lebih lanjut melihat bahwa ada dua karakteristik desa miskin, yaitu terbatasnya aset produktif seperti lahan dan kapital dan kualitas sumber daya manusia sebagian besar sangat rendah. Kedua karakteristik tersebut diduga merupakan kendala dalam mengaplikasikan suatu teknologi atau pemanfaatan secara optimal kesempatan ekonomi. Walaupun demikian, Hayami dan Masau (1997) membuktikan bahwa secara umum dalam kondisi tertentu perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya, petani miskin di pedesaan dicirikan tidak hanya oleh tingkat pendapatan yang rendah tetapi tidak stabilnya pendapatan itu sendiri juga merupakan permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan bagi petani berlahan sempit seyogyanya memperhatikan kedua hal tersebut. Artinya, program pengentasan kemiskinan diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan tetapi juga menstabilkan pendapatan secara bersama-sama. Dalam kaitan itu, Departemen Pertanian merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam upaya turut memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat yang kurang beruntung tersebut.

Dalam mengaplikasikan program penanggulangan kemiskinan masyarakat pertanian di pedesaan, diperlukan pengetahuan yang komprehensif agar “sesuai” baik dari segi kelompok sasaran, jenis kegiatan, waktu, maupun lokasi yang spesifik demi keberhasilannya. Untuk itu, diperlukan penelitian dalam rangka memperoleh berbagai informasi mengenai karakteristik masyarakat petani miskin dan faktor yang menyebabkannya meliputi aspek sosial dan ekonomi. Studi perencanaan model penanggulangan kemiskinan petani berlahan sempit ini dilaksanakan oleh tim oleh penulis sebagai Project Director dan Dr. Faisal Kasryino sebagai penasehat utama.

## **PEMBAHASAN**

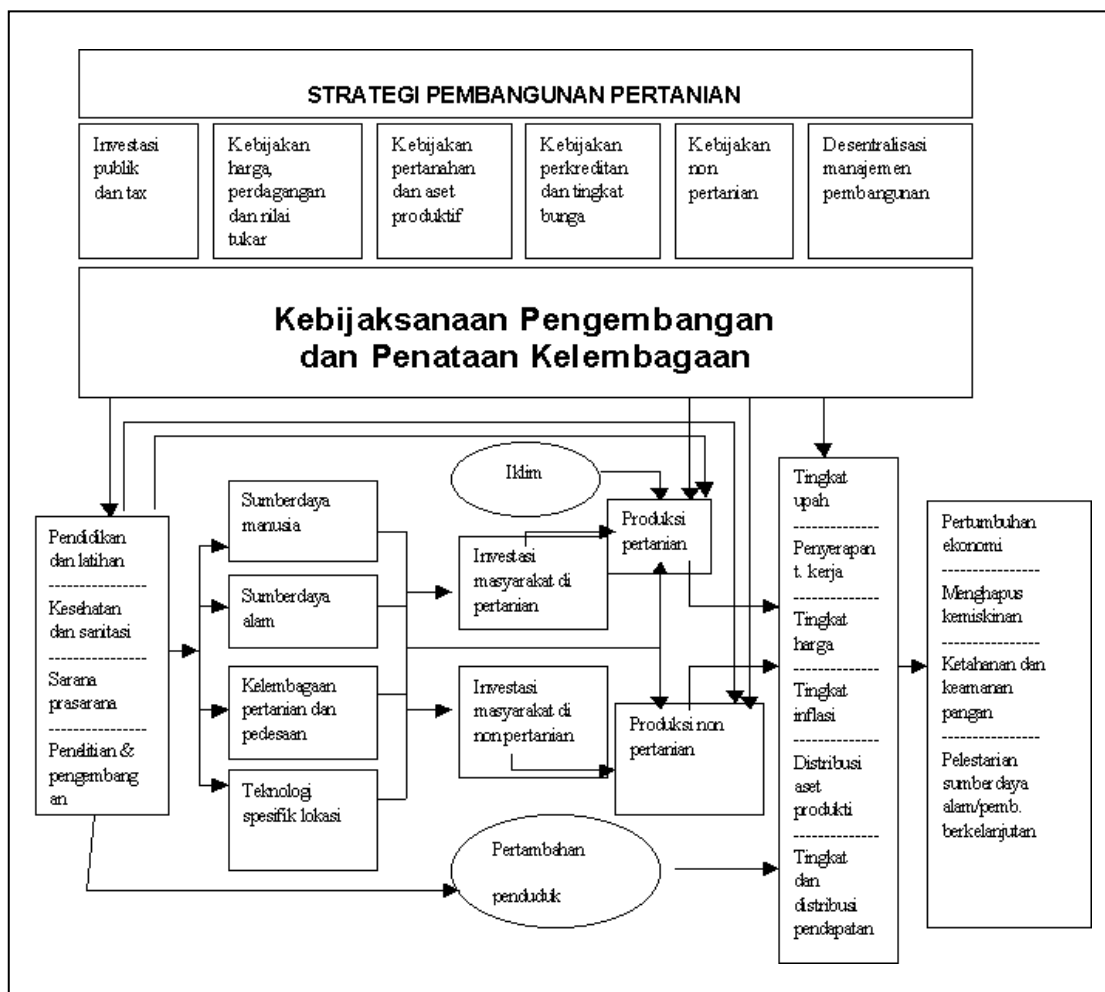
### **Kerangka Pemikiran**

#### **I. Orientasi Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut, diperlukan partisipasi petani dan masyarakat sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien dan dinamis diikuti pembagian surplus ekonomi antarpelaku secara adil. Sehubungan dengan hal itu, strategi pembangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (*human capital*) masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi teknologi baru, dan menata kembali kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti luas.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan besar yang maju dan modern dan dualisme antara kota dan desa. Kondisi itu menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat petani dan pedesaan dengan sebesar mungkin melibatkan masyarakat.

Operasionalisasi paradigma baru dan kerangka pikir pembangunan pertanian dikemukakan pada Gambar 1. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa peranan pemerintah difokuskan pada memberikan pelayanan dan memfasilitasi kegiatan produksi yang dilaksanakan masyarakat melalui berbagai investasi dan pengembangan kelembagaan penunjang, terutama kelembagaan penguasaan aset produktif (lahan pertanian) dan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menciutkan lahan pangan di Jawa seluas hampir sejuta hektar (kurang lebih separuhnya adalah lahan beririgasi), berkurangnya 1,9 juta petani dan bertambahnya 2,6 juta buruh tani (Sensus Pertanian 1993) dan semakin sempitnya penguasaan lahan per petani. Hal itu merupakan refleksi tidak efektifnya pelaksanaan UUPA 1960 yang sekaligus kegagalan pembangunan pertanian dan kebijaksanaan ekonomi makro.

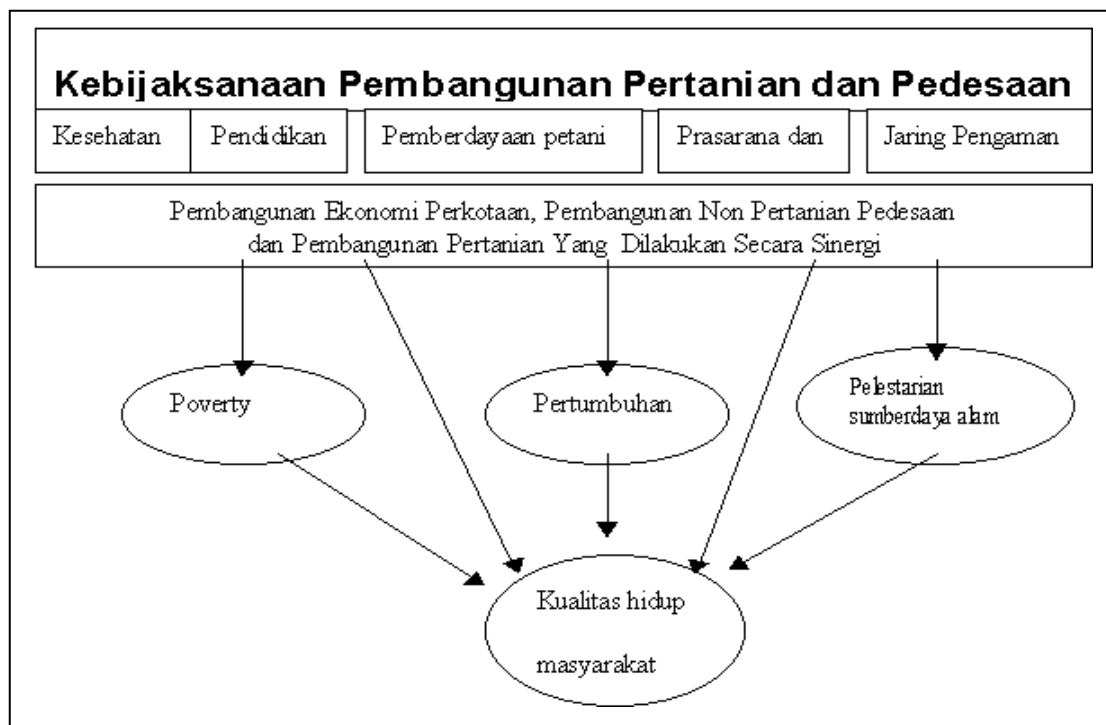


Gambar 1 Kebijakan Pembangunan Pertanian (Modifikasi Hazell and Rosegrant, 1999)

Dari strategi pembangunan pertanian yang dilukiskan pada Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa tanpa investasi kebijaksanaan pemerintah masyarakat mampu melakukan investasi pertanian. Secara tidak langsung pemerintah dapat mendorong investasi pertanian melalui investasi bidang pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, penelitian dan pengembangan. Secara langsung melalui kebijaksanaan moneter dan pengembangan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri dan kebijaksanaan pertanahan dan aset produktif, termasuk kebijaksanaan tata guna lahan dan tata ruang pembangunan pertanian.

Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemantapan ketahanan pangan dan menghilangkan kemiskinan. Ketahanan pangan mencakup berbagai aspek, antara lain ketersediaan, keandalan, keberlanjutan dan keterjangkauan. Golongan masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan adalah angkatan kerja yang bekerja di sektor informal dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Kondisi itu semakin parah dengan terbatasnya jangkauan terhadap penguasaan lahan pertanian dan aset produktif lainnya.

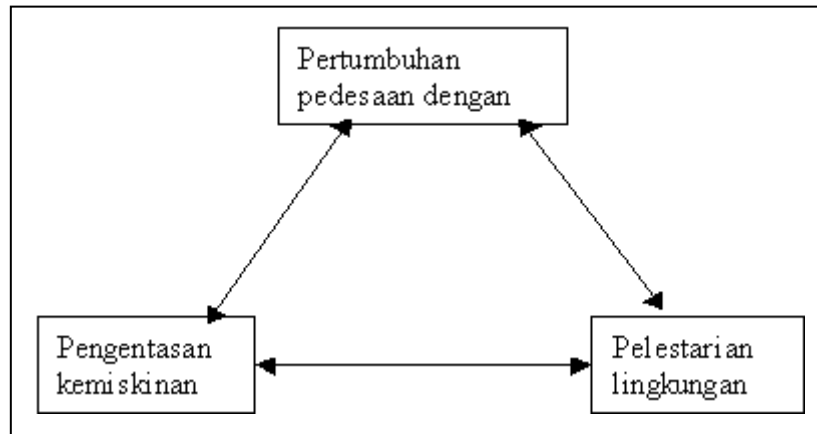
Kualitas hidup masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh (i) terjadinya saling keterkaitan dan sinergi antara pengembangan ekonomi perkotaan, nonpertanian pedesaan, dan sektor pertanian; (ii) peningkatan produksi pertanian dan nonpertanian pedesaan yang berorientasi pada peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja pedesaan; (iii) penyempurnaan kelembagaan pertanian dan pedesaan untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara optimal berkelanjutan; dan (iv) pengelolaan konsumsi bernilai gizi dan sanitasi pedesaan. Secara keseluruhan disederhanakan pada Gambar 2.



Gambar 2 Pengembangan Kualitas Hidup Masyarakat (Dimodifikasi dari Hazell dan Rosegrant, 1999)

## II. Cakupan Analisis

Secara umum, strategi pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Pertumbuhan ekonomi pedesaan yang pesat dalam waktu bersamaan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pertumbuhan dengan pemerataan, dan kelestarian lingkungan. Keterkaitan antara tiga parameter tersebut disederhanakan dalam “segi-tiga kritis” (*critical triangle*) seperti disajikan pada Gambar 3.

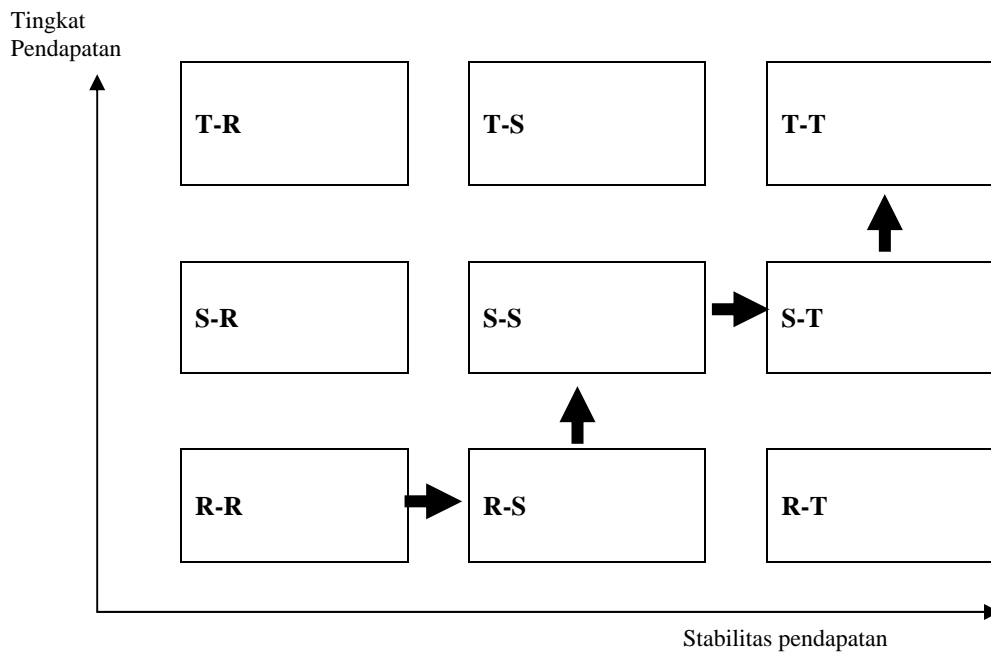


Gambar 3 Segi-Tiga Kritis pada Pembangunan Pedesaan (Sumber: ADB, 2000)

Analisis diarahkan pada bagaimana kebijaksanaan dan strategi pemerintah mempengaruhi segi-tiga kritis. Review secara komprehensif diperlukan pada sektor pertanian dan ekonomi pedesaan yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, juga diperlukan (i) review dan analisis intervensi pemerintah terhadap insentif produksi, subsidi, dan pajak pada struktur ketenagakerjaan pertanian, produksi, pendapatan, pelestarian sumber daya alam, dan kemiskinan; (ii) analisis perubahan struktur dan pola ketenagakerjaan pertanian, produksi, dan jender; (iii) perubahan struktur konsumsi rumah tangga; (iv) diskusi mengenai implikasi dari perubahan ekonomi pedesaan terhadap pertumbuhan, pengentasan kemiskinan dan kelestarian pembangunan; dan (v) memprediksi alternatif pilihan untuk pertumbuhan pertanian dan pedesaan di masa mendatang dan kemungkinan kebijaksanaan intervensi untuk mendorong pertumbuhan dengan pemerataan dan pelestarian pembangunan.

## III. Fokus Analisis

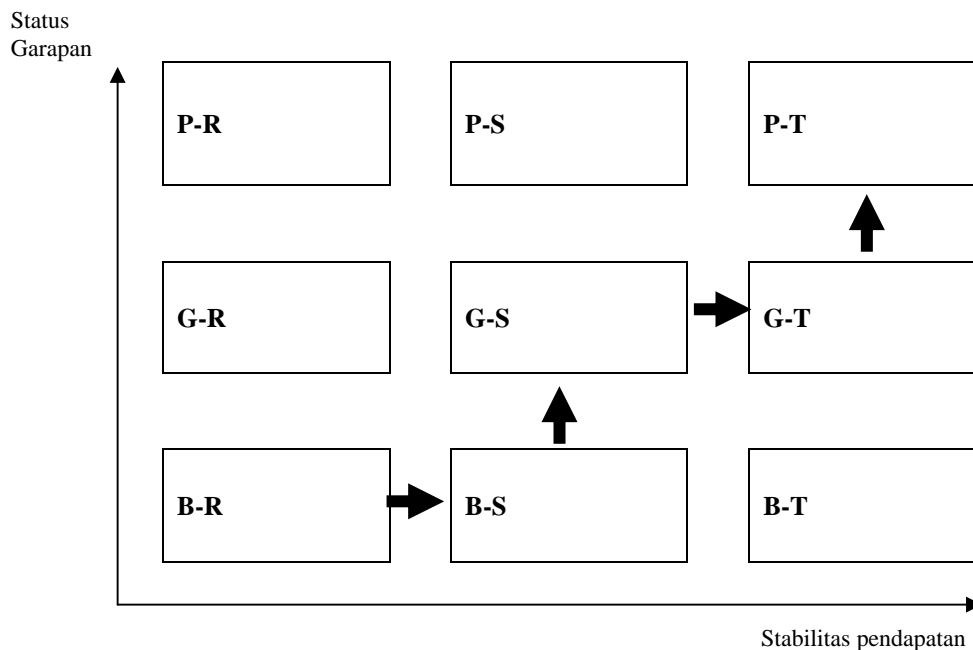
Rumah tangga petani miskin berlahan sempit dicirikan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan yang rendah dan tingginya fluktuasi menurut waktu. Komunitas di masyarakat dapat diklasifikasi ke dalam tingkatan dari kedua parameter tersebut. Tingkat pendapatan distrata dalam 3 klas, yaitu tingkat pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Strata yang sama juga dilakukan pada stabilitas pendapatan, yaitu pendapatan dengan stabilitas tinggi, sedang, dan rendah. Hubungan kedua parameter dalam masing-masing klas disederhanakan dengan matriks berikut ini.



Keterangan

- T-T : petani *berpendapatan tinggi* dengan *stabilitas tinggi*
- T-S : petani *berpendapatan tinggi* dengan *stabilitas sedang*
- T-R : petani *berpendapatan tinggi* dengan *stabilitas rendah*
- S-T : petani *berpendapatan sedang* dengan *stabilitas tinggi*
- S-S : petani *berpendapatan sedang* dengan *stabilitas sedang*
- S-R : petani *berpendapatan sedang* dengan *stabilitas rendah*
- R-T : petani *berpendapatan rendah* dengan *stabilitas tinggi*
- R-S : petani *berpendapatan rendah* dengan *stabilitas sedang*
- R-R : petani *berpendapatan rendah* dengan *stabilitas rendah*

Selanjutnya, para petani berpenghasilan rendah juga dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis status garapan lahan pertanian, yaitu pemilik penggarap, penggarap (bagi hasil) dan buruh tani, dan dihubungkan juga dengan tingkat stabilitas pendapatan. Hubungan tersebut disederhanakan pada matriks berikut.

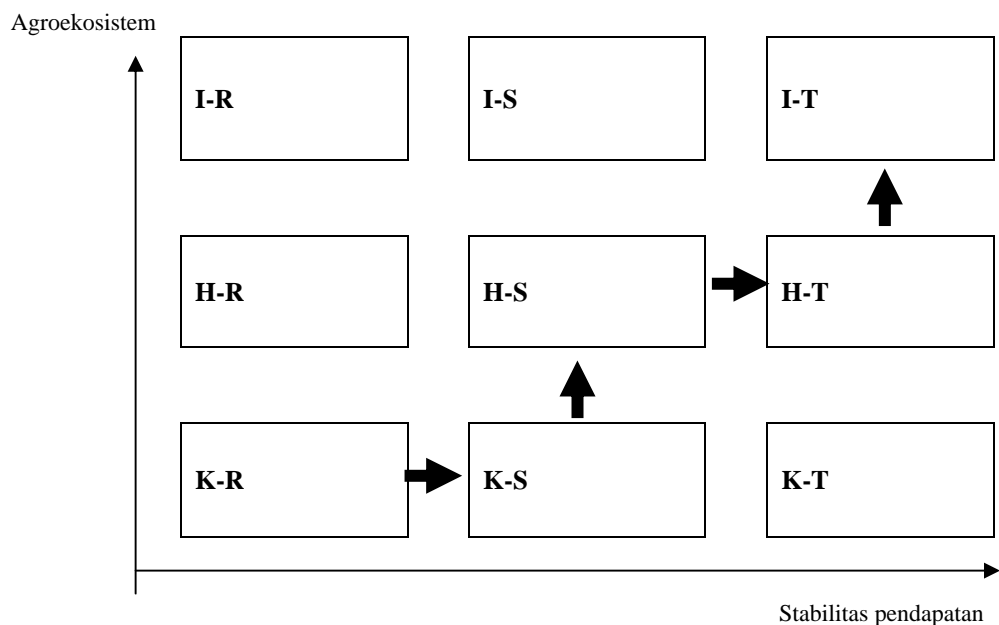


**Keterangan**

- P-T : petani dengan status *pemilik penggarap* dengan *pendapatan stabilitas tinggi*
- P-S : petani dengan status *pemilik penggarap* dengan *pendapatan stabilitas sedang*
- P-R : petani dengan status *pemilik penggarap* dengan *pendapatan stabilitas rendah*
  
- G-T : petani dengan status *penggarap* dengan *pendapatan stabilitas tinggi*
- G-S : petani dengan status *penggarap* dengan *pendapatan stabilitas sedang*
- G-R : petani dengan status *penggarap* dengan *pendapatan stabilitas rendah*
  
- B-T : petani dengan status *buruh tani* dengan *pendapatan stabilitas tinggi*
- B-S : petani dengan status *buruh tani* dengan *pendapatan stabilitas sedang*
- B-R : petani dengan status *buruh tani* dengan *pendapatan stabilitas rendah*

Selain dengan tingkat pendapatan dan status garapan lahan, tingkat stabilitas pendapatan petani dihubungkan juga dengan agroekosistem (lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering). Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa agroekosistem suatu wilayah erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi anggota masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayah yang bersangkutan. Secara sederhana hubungan antara kedua parameter tersebut ditunjukkan pada matriks berikut.





Keterangan

- I-T : petani di lahan *irigasi* dengan pendapatan stabilitas *tinggi*
- I-S : petani di lahan *irigasi* dengan pendapatan stabilitas *sedang*
- I-R : petani di lahan *irigasi* dengan pendapatan stabilitas *rendah*
- H-T : petani di lahan *tadah hujan* dengan pendapatan stabilitas *tinggi*
- H-S : petani di lahan *tadah hujan* dengan pendapatan stabilitas *sedang*
- H-R : petani di lahan *tadah hujan* dengan pendapatan stabilitas *rendah*
- K-T : petani di lahan *kering* dengan pendapatan stabilitas *tinggi*
- K-S : petani di lahan *kering* dengan pendapatan stabilitas *sedang*
- K-R : petani di lahan *kering* dengan pendapatan stabilitas *rendah*

Penelitian akan mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat stabilitas serta alternatif solusi meningkatkan kedua parameter tersebut. Bagi petani yang memiliki tingkat pendapatan rendah, diupayakan cara yang efektif untuk meningkatkannya sementara petani yang belum memiliki pendapatan yang stabil, diupayakan solusi yang sesuai. Secara spesifik analisis yang dilakukan berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani miskin berlahan sempit dan berbagai aspek, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Aspek yang dimaksud meliputi (i) identifikasi mengenai karakteristik rumah tangga petani yang klasifikasikan berdasarkan tingkat pendapatan dan stabilitas pendapatan; (ii) identifikasi faktor yang menyebabkan pendapatan rumah tangga petani rendah dan faktor yang mengakibatkan tidak stabilnya pendapatan; dan (iii) identifikasi mengenai alternatif solusi untuk meningkatkan dan menstabilkan pendapatan rumah tangga.

## Tujuan Penelitian dan Keluaran yang Diharapkan

### I. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk menciptakan model perencanaan pengentasan kemiskinan khususnya rumah tangga petani berlahan sempit dengan bertahap dan berkesinambungan. Secara spesifik, tujuan yang akan dicapai adalah (i) membangun model perencanaan dalam rangka membantu petani miskin berlahan sempit; dan (ii) menentukan model bantuan/fasilitas/investasi pemerintah secara bertahap untuk membantu petani miskin berlahan sempit.

### II. Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu (1) model perencanaan dalam rangka membantu petani miskin berlahan sempit; dan (2) model bantuan/fasilitas/investasi pemerintah untuk membantu petani miskin berlahan sempit secara bertahap dan berkesinambungan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

## Metode

### I. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada agroekosistem (lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering). Dengan dasar luas dominan dari agroekosistem tertentu (lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering) dan populasi desa miskin yang relatif banyak, dipilih kabupaten sebagai lokasi penelitian. Kabupaten yang secara sengaja dipilih yang mewakili masing-masing agroekosistem tersebut sebagai berikut.

1. Lahan sawah irigasi  
Kabupaten Indramayu (Jawa Barat)  
Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur)
2. Lahan sawah tadah hujan  
Kabupaten Blora (Jawa Tengah)  
Kabupaten Lombok Tengah (NTB)
3. Lahan kering  
Kabupaten Blitar (Jawa Timur)  
Kabupaten Lampung Utara (Lampung)

### II. Metode Pemilihan Lokasi dan Responden

Pemilihan lokasi dilakukan secara bertingkat dengan beberapa tahap sebagai berikut.

1. Ditingkat kabupaten dihimpun data mengenai kecamatan yang mencirikan agroekosistem tertentu. Berdasarkan informasi tersebut dipilih 2 kecamatan yang dinilai sesuai dengan kriteria agroekosistem yang disaratkan dengan ciri (X/Y) tertinggi.

$X$  = luas lahan pertanian dengan agroekosistem tertentu (kecamatan)

$Y$  = total luas lahan pertanian (kecamatan)

Kedua kecamatan terpilih diklasifikasikan 1 kecamatan dengan aksesibilitas baik dan 1 kecamatan lagi dengan aksesibilitas buruk.

Kriteria tingkat aksesibilitas dipergunakan parameter berikut.

- a. kondisi jalan
  - b. jarak ke pusat perekonomian dan pemerintahan
  - c. ada/tidak angkutan publik (kendaraan umum roda empat)
2. Selanjutnya, dari masing-masing kecamatan terpilih, dipilih 3 desa yang dicirikan berikut ini.
    - a. Agroekosistem tertentu dengan kriteria (A/B) tertinggi  
 A = luas lahan pertanian dengan agroekosistem tertentu (desa)  
 B = total luas lahan pertanian (desa)
    - b. Proporsi rumah tangga miskin dengan (C/D) tertinggi  
 C = jumlah rumah tangga miskin (desa)  
 D = total jumlah rumah tangga (desa)  
 Rumah tangga miskin ditentukan menggunakan kriteria BKKBN seperti yang dipergunakan program JPS, yaitu Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I
  3. Ke-6 desa (3 desa di kecamatan dengan aksesibilitas baik dan 3 desa di kecamatan dengan aksesibilitas buruk), dilakukan pengecekan langsung di lokasi untuk melihat kebenaran dan kesesuaian informasi yang diperoleh. Hal yang dilakukan pengecekan di lokasi meliputi aspek agroekosistem, kemiskinan, aksesibilitas, populasi petani miskin berlahan sempit, jenis status garapan yang berlaku, jenis mata pencaharian angkatan kerja rumah tangga, dan lain-lain.
  4. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, dari 3 desa di masing-masing kecamatan dipilih 1 desa yang dinilai paling sesuai dengan kriteria yang dipergunakan. Dengan demikian, diperoleh 2 desa contoh (masing-masing 1 desa setiap kecamatan) yang dijadikan lokasi penelitian. Satu desa dengan tingkat aksesibilitas baik dan satu desa dengan aksesibilitas buruk. Di masing-masing desa didaftar rumah tangga miskin melalui administrasi desa. Dari daftar tersebut diklarifikasi dan mengeluarkan rumah tangga miskin yang tidak termasuk target penelitian, yaitu individu/KK yang tidak mampu untuk bekerja dan berusaha, seperti lanjut usia/jompo, cacat, sakit, dan sebagainya.
  5. Setiap desa dipilih secara acak sebanyak 30 rumah tangga dari daftar rumah tangga miskin yang telah “dibersihkan”. Ke-30 rumah tangga tersebut diwawancara dengan kuesioner yang terstruktur. Selain itu, data yang bersifat umum dan makro tingkat desa dikumpulkan dengan metode wawancara kelompok (*group interview*).

### III. Metode Analisis

Dari setiap tujuan yang ingin dicapai, sebagian besar analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif. Analisis menggunakan alat sederhana berupa nilai rata-rata, korelasi, tabelasi silang, frekuensi distribusi, dan lain-lain. Parameter yang dipergunakan dalam analisis terdiri dari dua variabel utama yang meliputi pendapatan rumah tangga dan stabilitas pendapatan. Definisi dan batasan kedua variabel tersebut sebagai berikut.

#### 1. Pendapatan Rumah Tangga

Merupakan total pendapatan yang diterima rumah tangga selama satu tahun yang berasal dari semua kegiatan/usaha dari semua anggota rumah tangga ditambah pendapatan lain yang diperoleh tanpa bekerja/berusaha. Pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber disederhanakan seperti berikut.

$$Y = \sum_{i=1}^n X_{ij} + \sum_{i=1}^m P_i$$

Y = adalah total pendapatan rumah tangga

$X_{ij}$  = pendapatan dari kegiatan/usaha ke-j dari anggota rumah tangga ke-i

$P_i$  = pendapatan yang diperoleh tanpa bekerja/berusaha ke-i

## 2. Stabilitas Pendapatan

Pada dasarnya, ukuran stabilitas pendapatan dikaitkan dengan waktu atau frekuensi menerima pendapatan (*flow of income by time*) dalam periode satu tahun. Makin kecil variasi penerimaan pendapatan menurut waktu stabilitas pendapatan makin tinggi. Atau, makin tersebar sejumlah pendapatan yang diterima menurut waktu, stabilitas pendapatan makin tinggi. Untuk mendiagnosa tingkat stabilitas pendapatan suatu rumah tangga, dilakukan pendekatan dengan beberapa metode sebagai berikut.

- a. Tabel sumber pendapatan menurut waktu (musim, bulan).
- b. Ragam sumber pendapatan rumah tangga.
- c. Rasio jumlah yang bekerja terhadap total anggota rumah tangga.

## IV. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk analisis terdiri dari 2 jenis, yaitu data tingkat rumah tangga dan data yang bersifat umum. Data tingkat rumah tangga meliputi karakteristik anggota rumah tangga, penguasaan aset produktif, tingkat teknologi usaha tani, sumber pendapatan rumah tangga, pengeluaran/konsumsi rumah tangga, keikutsertaan dalam kegiatan/program yang dilaksanakan, persepsi terhadap program yang ada dan harapan di waktu mendatang. Data yang bersifat umum terdiri dari: keadaan umum masyarakat dan perubahan yang terjadi, peluang ekonomi dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas yang ada, potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, kualitas dan kuantitas angkatan kerja, mobilitas tenaga kerja, tingkat upah, dan lain-lain.

## V. Lingkup dan Tahapan Kegiatan

Lingkup penelitian dibatasi pada diskusi kualitatif mengenai karakteristik rumah tangga, identifikasi faktor yang menyebabkan pendapatan rumah tangga petani rendah, dan faktor yang mengakibatkan tidak stabilnya pendapatan. Selain itu, analisis dan diskusi juga diarahkan pada identifikasi mengenai alternatif solusi untuk meningkatkan dan menstabilkan pendapatan rumah tangga.

Penelitian terdiri dari lima tahapan kegiatan, yaitu (i) persiapan yang terdiri dari pembuatan Rancangan Penelitian Operasional dan membuat Daftar pertanyaan; (ii) pengumpulan data dan informasi yang relevan; (iii) analisis dan pengolahan data; (iv) penulisan laporan dan seminar hasil; dan (v) finalisasi dan pengandaan laporan.

## PENUTUP

### Hasil Penelitian dan Implikasi Kebijakan

Pendapatan rumah tangga petani lahan sempit sangat bervariasi antaragroekosistem dan aksesibilitas. Pada daerah dataran tinggi, rata-rata pendapatan berkisar antara Rp280 ribu sampai Rp2.326 ribu/kapita/tahun. Sementara itu, pada daerah dataran rendah, berkisar antara Rp321 ribu sampai Rp2.888 ribu/kapita/tahun. Pada umumnya, rata-rata pendapatan pada lahan kering lebih rendah dibandingkan agroekosistem lainnya. Selain itu, pendapatan rumah tangga petani di daerah akses baik juga lebih tinggi dibandingkan di daerah akses buruk. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendapatan petani pemilik penggarap secara umum lebih tinggi daripada petani penggarap.

Kontribusi pendapatan rumah tangga petani berlahan sempit dari sektor pertanian lebih kecil dibandingkan sektor nonpertanian, yaitu antara 40-41 persen. Kecenderungan tersebut berlaku untuk semua agroekosistem, kecuali pada lahan kering dataran tinggi (70-80%). Kontribusi dominan tersebut terutama berasal dari usaha tani sayuran. Ragam sumber pendapatan yang tercermin dari nilai indeks Entropy menunjukkan bahwa sumber pendapatan rumah tangga petani di dataran tinggi lebih beragam daripada di dataran rendah.

Pada umumnya, pendapatan petani berlahan sempit sangat kecil dan fluktuatif sehingga tingkat dan stabilitas pendapatannya termasuk rendah. Adapun karakteristik rumah tangga tersebut seperti berikut. (1) Rata-rata uum kepala keluarga (KK) masih produktif; (2) pendidikan KK rendah; (3) ada anggota keluarga yang bekerja; (4) memelihara ternak; dan (5) sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor nonpertanian.

Berdasarkan hasil temuan, upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani berlahan sempit terutama dari sektor pertanian pada umumnya adalah (1) perbaikan teknologi sistem usaha tani; (2) pengembangan usaha peternakan; dan (3) pengembangan kelembagaan keuangan mikro di pedesaan. Untuk lebih detail, alternatif program di setiap agroekosistem seperti berikut.

#### I. Daerah Sawah Irigasi Dataran Tinggi

##### Jangka Pendek

1. Peningkatan produksi padi dengan program P3T (Peningkatan Produksi Padi Secara Terpadu) melalui PTT (Pengelolaan Tanaman dan Sumber daya Secara Terpadu). Pengembangan peternakan (ternak besar) secara komunal, selain mendapatkan keuntungan dari penggemukan, juga akan menyediakan tenaga kerja ternak dan pupuk kandang sebagai pupuk organik. Untuk pakan, dapat digunakan jerami fermentasi yang selama ini dibakar.
2. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro, misalnya KUM (Kredit Usaha Mandiri) untuk mengatasi kekurangan modal.

##### Jangka Panjang

1. Pengembangan usaha tani ternak besar secara komunal agar pengelolaan kotoran lebih efisien. Perbaikan manajemen pengelolaan ternak sistem komunal secara efisien. Kebutuhan modal untuk pengusahaan ternak ataupun pembelian sarana produksi diperoleh dari lembaga keuangan (KUM).

2. Pengembangan agroindustri di pedesaan menggunakan bahan baku murah, tersedia lokal dan memiliki aspek pemasaran yang baik.

## **II. Daerah Sawah Tadah Hujan Dataran Tinggi**

### Jangka Pendek

1. Eksplorasi potensi air tanah dengan sumur pantek dan pompa air untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan pola tanam jagung-padi-jagung.
2. Peningkatan penguasaan teknologi sistem usaha tani jagung hibrida.
3. Pengembangan lembaga keuangan mikro untuk modal usahatani dan nonpertanian seperti industri anyaman bambu skala rumah tangga.

### Jangka panjang

1. Pengembangan usaha ternak besar (sapi potong) dan ternak kecil (domba + kambing) dan penghijauan kawasan untuk penyediaan hijauan makanan ternak (HMT). Pengembangan HMT meliputi pohon gamal dan di daerah tepian dapat ditanami rumput gajah, kinggras, dan lain-lain.
2. Perbaikan sarana jalan antardusun dan desa.

## **III. Daerah Lahan Kering Dataran Tinggi**

### Jangka pendek

1. Program pengembangan usaha tani sayuran-ternak sapi potong terpadu dalam menunjang pengembangan program sayuran organik.
2. Pengembangan kelembagaan koperasi dan keuangan mikro untuk mengatasi kesulitan permodalan usaha tani dan industri sulaman serta pemasaran hasil.

### Jangka panjang

1. Pembangunan dan perbaikan prasarana jalan untuk menekan biaya angkutan dan memperlancar arus barang (saprodi dan produksi).

## **IV. Daerah Sawah Irigasi Dataran Rendah**

### Jangka Pendek

1. Dalam usaha peningkatan pendapatan petani sistem usaha tani padi perlu dilaksanakan dengan pendekatan PTT, melalui perbaikan kesehatan lahan (pemberian pupuk organik), perbaikan teknik irigasi, penggunaan varietas unggul, dan pengelolaan hama penyakit terpadu. Disarankan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran untuk memotong siklus hama/ penyakit.
2. Tanaman hortikultura pengembangan agribisnis semangka dan mentimun dengan varietas unggul.
3. Pengembangan peternakan diarahkan pada jenis ternak ruminansia (sapi dan kambing/domba) dalam usaha optimalisasi tenaga kerja keluarga dan penyediaan pupuk kandang. Disarankan usaha ternak besar dilakukan secara komunal.

### Jangka panjang

1. Dalam usaha mengatasi kekurangan air di musim kemarau maka perlu dikembangkan sumur pantek.
2. Pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

## V. Daerah Sawah Tadah Hujan Dataran Rendah

### Jangka Pendek

1. Pengembangan teknologi pompa air dan sumur pantek untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau.
2. Pengembangan ternak sapi untuk sumber tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan tambahan pakan ternak sapi diperoleh dari jerami yang difermentasi.
3. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro untuk pengembangan yam buras.

### Jangka Panjang

1. Perlu dikembangkan sistem kemitraan untuk pengembangan kacang tanah.

## VI. Daerah Lahan Kering Dataran Rendah

### Jangka Pendek

1. Bantuan permodalan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan pada kelembagaan keuangan informal.
2. Pemberdayaan dan penciptaan lumbung desa yang dapat membantu petani baik dalam kesediaan pangan maupun permodalan usaha tani.
3. Bantuan ternak dengan pembinaan dan introduksi teknologi yang disertai kemudahan pemasaran.

### Jangka Panjang

1. Untuk mengatasi kesulitan permodalan, diperlukan bantuan permodalan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan pada sumber kredit informal melalui pengembangan kelembagaan keuangan mikro di pedesaan.
2. Dalam usaha mempertahankan kesuburan tanah dan pemanfaatan limbah jagung, perlu dikembangkan usaha tani jagung-ternak secara terpadu. Oleh karena itu, perlu bantuan ternak secara *revolving*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Collier, Williams, Gunawan Wiradi Soentoro, dan Makali. 1974. "Agricultural Technology and Institutional Change in Java "Food Research Institute Studies". Vol 13 (No 21), hlm. 169-194.
- Departemen Koperasi. 1998. *Skim Kredit untuk Program Koperasi, Pengusaha Kecil*. Direktorat Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Dep Kop, Jakarta 1998.
- Haryadi, Emmanuel 2000. *Micro Finance and The Poor, Some Reality Checks in Indonesia*.
- Pakpahan, A. 1995. "Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayaa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi." Effendi Pasandaran *et al. Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Hlm. 1-18.

- Rachman, B. 1989. "Skala Usaha dan Efisiensi Alokasi Masukan Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Penguasaan Lahan di Jawa Barat." Efendi Pasandaran *et al.* *Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Hlm. 78-93.
- Sayogyo. 1979. *Mengenai Partisipasi Mendasar Golongan Masyarakat Desa*. Bogor: LPSP-IPB.
- Soentoro. 1989. "Keragaan Hubungan Kerja dan Penguasaan Tanah pada Pasca Adopsi Teknologi (Kasus di Sulawesi Selatan)." Efendi Pasandaran *et al.* *Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Hlm. 59-77.
- Suharto, P. 1996. *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perkreditan Grammen Bank di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Mitra Usaha.
- Taryoto, Andin H. 1995. "Analisis Kelembagaan Dalam Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Suatu Pengantar." Andin Taryoto *et al.* *Prosiding Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian*. Bogor: PSE.
- Yujiro, Hayami dan Kikuchi Masao. 1997. *Dilema Ekonomi Pedesaan: Suatu Pendekatan terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zeller, Manfred and Manohaf Shaume. 1998. *Rural Finance and Poverty Alleviation Food Policy Research Institute*. Washington D.C.